

TEORI & HUKUM

PERUNDANG-UNDANGAN

Tanto Lailam, S.H.,LL.M.



PUSTAKA PELAJAR

Tanto Lailam, S.H.,LL.M.
TEORI & HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

“Di dalam Peraturan Perundang-undangan itu harus bersemayam ruh-ruh keadilan - kemanfaatan - kepastian hukum secara terpadu, bukan topeng ketidakadilan yang terus berupaya menggerogoti nilai-nilai Pancasila dan mengampulasi hak-hak rakyat”

Desain buku Teori & Hukum Perundang-undangan ini diawali dengan pemahaman peraturan perundang-undangan dan norma hukum. Kajian teoretis yang menjadi dasar adalah teori hierarki norma hukum Hans Kelsen – Nawiasky, tatanan piramida sistem hukum Indonesia, berikut filosofi tujuan hukum. Sisi yang menarik adalah hadirnya teori pertentangan norma hukum, yang mengkaji pertentangan/ konflik/ ketidaksesuaian/ ketidakharmonisan antara norma hukum yang derajatnya lebih rendah terhadap norma hukum yang derajatnya lebih tinggi, atau norma hukum yang berderajat sama. Pada bagian selanjutnya adalah landasan, nilai dasar dan asas hukum merupakan ruh-ruh keadilan - kemanfaatan - kepastian hukum yang menjadi dasar menciptakan tatanan sistem peraturan perundang-undangan yang baik dan berkelanjutan, yang nantinya akan tertuang dalam jenis dan materi muatan peraturan yang dibuat oleh setiap lembaga negara yang berwenang. Sisi yang paling menarik adalah pembentukan peraturan menghadirkan desain politik hukum, partisipasi masyarakat dan urgensi naskah akademis. Terakhir, pengujian peraturan yang melengkapi keindahan warna dalam buku ini dan sekaligus menjadi pedang - perisai rakyat untuk menggugat kebijakan negara yang tidak adil. Semoga buku ini menjadi referensi bagi pembentuk peraturan untuk membentuk peraturan yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat, bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara – hukum, terkhusus bagi mahasiswa yang selalu haus akan ilmu pengetahuan.



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548
Yogyakarta 55167
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id

TEORI & HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

**TEORI & HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN**

Cetakan Pertama • Februari 2017

Penulis • Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Pracetak •
Team Pustaka Pelajar

Diterbitkan oleh

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-602-229-719-2

Daftar Isi

Kata Pengantar * ----- vii**

Daftar Isi * ----- ix**

Bagian Kesatu: Pendahuluan

**** Pengertian/ Istilah Perundang-undangan ----- 1**

**** Norma Hukum ----- 8**

Bagian Kedua: Hierarki & Pertentangan Norma Hukum

12 ----- ** Pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky

19 ----- Desain *Stufenbau* Tujuan Hukum

19 ----- Nilai-Nilai Hukum

22 ----- Asas/ Prinsip

23 ----- Norma / Kaidah

24 ----- Sikap Tindak

25 ----- ** Hierarki Norma Hukum Indonesia

31 ----- ** Teori Pertentangan Norma Hukum

Bagian Ketiga: Landasan, Nilai Dasar & Asas

Peraturan Perundang-undangan

**** Landasan Peraturan Perundang-undangan ----- 61**

Landasan Filosofis ----- 62

Landasan Sosiologis ----- 66

Landasan Yuridis ----- 70

Landasan Politis dan Administratif ----- 71

**** Nilai-nilai Dasar dalam Peraturan ----- 72**

Nilai Keadilan ----- 80

Nilai Kemanfaatan -----	81
Nilai Kepastian Hukum -----	82
** Asas-asas Hukum -----	87
Asas <i>lex superior derogat legi inferior</i> -----	88
Asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> -----	89
Asas <i>lex posterior derogat legi priori</i> -----	90
Asas legalitas -----	92
Asas-asas Formil -----	95
Asas-asas Materill -----	98

**Bagian Keempat: Jenis & Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan**

101 ----- ** Pancasila: Penuntun Materi Muatan	
108 ----- ** Perkembangan Jenis & Materi Muatan	
115 ----- ** Jenis & Materi Muatan Peraturan di tingkat Pusat	
115 ----- UUD 1945	
122 ----- UUD 1945: Konstitusi yang Islami	
131 ----- Ketetapan MPRS/MPR	
135 ----- Undang-undang	
138 ----- Perppu	
140 ----- Peraturan Pemerintah	
141 ----- Peraturan Presiden	
141 ----- Peraturan Lainnya	
142----- ** Jenis & Materi Muatan Peraturan di Tingkat Daerah	
142 ----- Hakikat Otonomi dan Produk Hukum	
146 ----- Materi Muatan	
150 ----- Peraturan Kepala Daerah	
151----- ** Jenis & Materi Muatan Peraturan di Tingkat Desa	

**Bagian Kelima: Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan**

** Politik Hukum: Desain Pembentukan Peraturan -----	156
--	-----

- ** Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan ---- 169
- ** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ---- 176
- ** Urgensi NA dalam Pembentukan UU & Perda ---- 190

**Bagian Keenam: Pengujian Peraturan
Perundang- Undangan di Indonesia**

- 203 ---- ** Sejarah Pengujian Peraturan
- 216 ---- ** Ragam Pengujian Norma Hukum
 - 218 ---- *Toetsingrecht*
 - 222 ---- *Judicial Review*
 - 226 ---- *Constitutional Review*
- 231 ---- Pengujian Peraturan Perundang-undangan
- 234 ---- ** Pengujian Formil, Materiil dan Keberlakuan
 - 234 ---- Pengujian Formil
 - 236 ---- Pengujian Materiil
 - 240 ---- Pengujian Keberlakuan
 - 245 ---- ** Skema Pengujian Peraturan
 - 247 ---- Pengujian Undang-undang
 - 258 ---- Pengujian Penjelasan Undang-undang
 - 260 ---- Pengujian Lampiran Undang-undang
 - 261 ---- Pengujian Undang-undang Ratifikasi
 - 283 ---- Pengujian Perppu
- 271 ---- ** Pengujian Peraturan di bawah Undang-undang
 - 271 ---- Pengujian oleh Mahkamah Agung
 - 277 ---- Pengujian oleh Mendagri dan Gubernur
 - 281 ---- Menyoal Pengujian Ketetapan MPRS/ MPR
- Daftar Pustaka ---- 287

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (Ed), 2010, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-PDIH Undip, Yogyakarta-Semarang
- Ahmad Ruslan, 2013, *Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Ali Imron, 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta
- , dan M.Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta
- A.Hamid. S. Attamimi, 1990, *Disertasi "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahabn Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- AM Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta,
- Bagir Manan, 1987, *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.

- , 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, InHillCo, Jakarta.
- , 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Beni Achmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Benny K. Harman, 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta
- Dahlan Thaib, Ni'matul Huda, dan Jazim Hamidi, 2005, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dardji Darmodiharjo (ed), 1985, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Herlin Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, UAJY, Yogyakarta
- , 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, UAJY, Yogyakarta
- H.M. Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Soebhechi, 2012, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang

- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- , 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Jason M. Patlis, dkk (Penyuting), 2005, *Buku Narasi: Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan *Coastal Resources Management Project/ Mitra Pesisir*, Jakarta
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konpress, Jakarta.
- , dan Kemilau Mutik, 2011, *Legislative Drafting*, Total Media, Yogyakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yasrif Watampone, Jakarta
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I)*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid II)*, Sekjend dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- , 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), Jakarta.
- , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekjend dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta
- , 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta,
- dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.2
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Komisi Hukum Nasional, tanpa tahun, *Ringkasan Eksekutif Penelitian Program Legislasi Nasional*, KHN-Jakarta
- Kaelan, 1993, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta

- Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- , 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2008, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi yang Hidup*, Sekjen dan kepaniteraan MKRI, Jakarta
- Masdar Farid Mas'udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Alfabet, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta,
- Moh. Busyro Muqoddas, dkk (Peny.), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta
- Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan Undang-undang Dasar oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, UGM Press, Yogyakarta
- Muhammad Saikhu, Agus Surono, Farakh Harahap, dan Zaini Nurzaman (Ed), 2011, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi serta Permasalahan dibidang Hukum (Suatu Rekomendasi)*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi (ed), 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung

- Ni'matul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta,
- , 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, FH UII Press, Yogyakarta
- , 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Notonegoro, 1988, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano, 1993, *Ikhtisar Antinomi: Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1996,1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- , Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda (2010), *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Padang dan Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Rancangan antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung
- , 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- , 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- , 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Kompas, Jakarta,
- , 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siti Fatimah, 2005, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Pilar Media, Yogyakarta
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung

- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif dibidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, UMM Press, Malang
- Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Jawa Timur
- Tanto Lailam, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta
- , 2015, *Pertentangan Norma Hukum dalam Praktek Pengujian Undang-undang di Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta
- Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000, *Amandemen UUD 1945 antara Teks dan Konteks dalam Negara Yang Sedang Berubah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tim Peneliti MKRI, 2005, *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim KRHN, 2008, *Menggapai Keadilan Konstitusi: Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, KRHN-DRSP-USAID, Jakarta.
- Van der Vlies, 2005, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, terj. Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Winarno Yudho, Andi M. Asrun, Ahsin Tohari, Bisariyadi, Nanang Subekti., 2005, *Analisis Sosio-Yuridis dan Politik Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad -Adenauer- Stiftung, Jakarta
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Yusril Ihza Mahendra, 2002, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Catatan dan Gagasan)*, Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Makalah dan Artikel :

- Abdulah Kelib, dalam "Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Islam)", Ahmad Gunawan dan Mu'ammir Ramadhan (Ed), 2010, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-PDIH Undip, Yogyakarta-Semarang
- Alfitri, dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
- Achmad Edi Subiyanto, dalam "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi* Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
- Afan Gaffar, dalam "Pembangunan Hukum dan Demokrasi", Moh. Busyro Muqoddas, dkk (Penyunting), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta
- Arbab Paproeka, dalam "Perubahan Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan", *Bunga Rampai Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2009, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Arbi Sanit, dalam "Politik Sebagai Sumberdaya Hukum, Telaah Mengenai Dampak Tingkahlaku Politik Elit dan Massa Terhadap Kekuasaan Hukum di Indonesia", Artidjo Alkostar dan M.Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, LBH Yogyakarta dan Rajawali, Jakarta,
- Bisariyadi, dkk., dalam "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomor 3, September 2012
- Deklarasi Bulaksumur, dibacakan pada saat Kongres Pancasila 1 Juni 2009
- Dian Agung Wicaksono, dalam "Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013
- Dodi Haryono, dalam "Kajian Terhadap Putusan Perkara No:11/G.TUN/2005/PTUN/PBR Tentang Pembatalan SK Bupati Rokan Hilir No: 78/TP/2005, dalam *Jurnal Yudisial* Vol-I/No-03/Desember/2007,

- Donald A. Rumokoy, "Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya", dalam S.F Marbun dkk (Peny.), 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Eddy Djunaedi, dalam "Judicial Review di Beberapa Negara: Suatu Kajian Perbandingan", *Varia Peradilan No.172, Januari 2000*,
- Edward O.S Hiariej, dalam "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan", Dinal Fedrian, dkk (ed), 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta
- Enny Nurbaningsih, 2004, *Heirarki Baru Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Mimbar Hukum Volume X No.48
- Hamdan Zoelva, dalam "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harjono, "Rancang Bangun Republik Indonesia", dalam Surono dan Mifthakhul Huda (ed), 2011, *Prosiding Sarasehan Nasional 2011: Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, MK dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- H.A.S Natabaya, "Manifestasi (Perwujudan) Nilai-Nilai Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2006
- Helmi, dalam "Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara", *Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007*
- Heryandi, dalam "Urgensi Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai Era Otonomi Daerah", *Jurnal Media Hukum Volume 16 No.3 Desember 2009*
- H.M Arsyad Sanusi, dalam "Legal Reasoning dalam Interpretasi Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2 November 2008
- Fajar Laksono, "Undang-undang tanpa Pengesahan Presiden: Sebuah Problem Legislasi Pasca Perubahan", dalam Volume 3 Nomor 3 September 2006
- Feri Amsari, dalam "Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009

- Iwan Satriawan, dalam "Kewenangan *Constitutional Review* MK dan Prinsip *Checks and Balances System* (Analisa terhadap Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006)", *Jurnal Konstitusi PK2P FH UMY*, Volume I, No.1 September 2008
- I Dewa Gde Atmadja, dalam "Poin-poin Krusial RUU Mahkamah Konstitusi", Firmansyah Arifin, dkk, 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, KRHN, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, "Catatan Pengantar Tentang *Toetsingrecht* dan *Judicial Review*", dalam Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- , "Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis", Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan 29 Desember 2007.
- , tanpa tahun, *Menelaah Putusan Mahkamah Agung Tentang Judicial Review Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2000 Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, tanpa tempat.
- , dalam "Mahkamah Konstitusi, Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX", dalam Julyus Wardi (ed), 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN, Jakarta.
- , dalam "Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa'at, Rafiudin Munis Tamar (ed), 2007, *Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum*, The Biography Institute, Bekasi
- Kuat Puji Prayitno, "Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (*Leitstern*) dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3 November 2007, Fakultas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Kusnu Goesniadhie S, dalam "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum*, Volume 14 No.3, Juli 2007
- Lita Arijati, dkk., dalam "Kemungkinan Perjanjian Internasional di-*Judicial Review*-kan", *Jurnal Konstitusi* Volume 3, Nomor 1, Februari 2006
- Mahfud MD, "Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi Pada Kongres Pancasila Pada Tanggal 30 Mei 2009", dalam Agus Wahyudi,

- Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- , dalam “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum Progresif untuk Keadilan Sosial”, makalah disampaikan dalam Seminar “Menembus Kebuntuhan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif” Semarang, Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009.
- , dalam “Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita”, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta
- , dalam “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum No.4 Vol.16 Oktober 2009*,
- , dalam “Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, bahan pada *Kuliah Umum di Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 6 Juni 2011
- Manunggal K. Wardaya, dalam “Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010
- Maruarar Siahaan, dalam “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010,
- Muhamad Ali Safa’at, dalam “*Toetsingsrecht, Judicial Review, Constitutional Review*”, *Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi*, No.14 Januari-Februari 2006.
- Muchtarom HR., 2006, dalam “Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konteks Global, Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan (Ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-PDIH Undip, Yogyakarta-Semarang
- Muladi, 2006, dalam “Pancasila Sebagai *Margin of Appreciation* Dalam Hukum Yang Hidup di Indonesia”, Ahmad Gunawan dan Mu’ammarr Ramadhan (Ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar-IAIN Walisongo-PDIH Undip, Yogyakarta-Semarang
- M. Faishal Aminuddin, dalam “Pelembagaan Demokrasi Konstitusional: MK dan Masa Depan Demokratisasi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor.1 Maret 2007

- M. Hatta Ali, dalam "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*) Pada Era Reformasi dan Transformasi", *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta
- M. Fajrul Falaakh, dalam "Terobosan MA Dalam Judicial Review", *Kompas* 24 Juni 1993
- , dalam "Dinamika *Judicial Review* di Indonesia", *Majalah Ilmiah Universitas Islam Indonesia Unisia No.28 Tahun XV Triwulan IV-1995*
- , dalam "Menggagas "*Constitutional Review*" di Indonesia", *Kompas* Edisi Sabtu 08 April 2000
- , dalam "Skema *Constitutional Review* di Indonesia: Tinjauan Kritis", *Jurnal Mimbar Hukum* No.38/I/2001.
- , dalam "Kritik atas Mahkamah Konstitusi", Bambang Widjojanto, dkk (ed), 2002, *Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , dalam "Konstitusi Dalam Berbagai Lapisan Makna", *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 3 September 2006*
- , 2009, dalam "Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta
- M. Ali Zaidan, dalam "Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan", *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta
- M. Syamsudin, dalam "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014
- Ni'matul Huda, dalam "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Perppu No.4 Tahun 2009 dan Perppu No.4 Tahun 2008)", *Jurnal Media Hukum*, Volume 18 No.2 Desember 2011
- , dalam "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Volume 10, Nomor 4, Desember 2013,
- Novi Ardiani, 2004, "Setahun Mahkamah Konstitusi: Jangan Terjebak ke Wilayah Politis", dalam Refli Harun (dkk), *Menjaga Denyut Konstitusi* (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi), Konstitusi Press, Jakarta.

- Nurhidayatulloh, dalam "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetapanegaraan RI", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012
- Nur Rohim Yunus, dalam "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, dalam "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di MK", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010
- Saifudin, "Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU", dalam *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009*
- Saldi Isra, "Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-undang", *Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 11 Februari 2010*
- , dalam "Kata Pengantar", Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, dalam "Sisi Lain Mahkamah Konstitusi," *Kompas*, 5 Januari 2009
- Satya Arinanto, dalam "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila", Agus Wahyudi, Rofiqul Umam Ahmad, Saldi Isra, Sindung Tjahyadi, dan Yudi Latif (ed), 2009, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Kerjasama UGM dengan Mahkamah Konstitusi, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?", Dinal Fedrian, dkk (ed), 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta
- Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, dalam "Hakim Kita Bukan *Speaker of Justice*. Belajar Dari Putusan", *Jurnal Yudisial Vol-I/No-01/Agustus/2007*
- Suteki, dalam "Analisis Doktrinal Taraf Sinkronisasi Vertikal Penerapan Nilai Keadilan Sosial di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air", *Jurnal Media Hukum*, Volume 16 No.1 Juni 2009.
- , dalam "Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam Dinal Fedrian, dkk (ed), 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta

- Tanto Lailam, "Non Konstitusi Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Rechtidee FH Universitas Trunojoyo Madura*, Volume 10 Nomor 9 Juni 2012,
- , dalam "Desain Tolok Ukur Pancasila dalam Pengujian Undang-undang untuk mewujudkan Keadilan Substantif", *Jurnal Konstitusi P3KP Universitas Jambi kerjasama dengan MKRI*, Volume II No.1 September 2013
- , dalam "Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum dalam Putusan Pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Bengkulu*, Volume II No.1 September 2013
- , dalam "Desain Pengujian Formil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang* Volume II No.1 September 2013
- , dalam "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Volume XXI, Juni 2014
- , dalam "Kontruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-undang", *Jurnal Konstitusi MKRI* Volume, 11 Maret 2014
- , dalam "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya", *Jurnal Konstitusi MKRI* Volume, 12 Desember 2015
- Teuku Mohammad Radhie, dalam "Pembangunan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Majalah Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973
- Wicipto Setiadi, dalam "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 3 Desember 2013
- Widodo Ekatjahjana, dalam "Mencermati *Ratio Decidendi* MK Dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN", *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010
- Yanis Maladi, dalam "Benturan Asas *Nemo Judex In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*" (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010